

LAIN-LAIN – PENGELOLAAN

PERDA KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 6 TAHUN 2013

2013

PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

ABSTRAK : - Bahwa penambahan jumlah penduduk, dan perubahan pola konsumsi masyarakat berpengaruh terhadap peningkatan volume, jenis dan karakteristik sampah. Bahwa pengelolaan sampah dari hulu ke hilir perlu dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna, agar memberikan manfaat secara ekonomi bagi daerah, yang berwawasan lingkungan. Bahwa dalam pengelolaan sampah diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan pemerintah daerah, serta peran masyarakat dan dunia usaha sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif dan efisien, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Sampah.

- Dasar Hukum : UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 18 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 6 Tahun 2006; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 26 Tahun 2008; PP No. 15 Tahun 2010; PP No. 27 Tahun 2012; PP No. 81 Tahun 2012; Per. Mendagri No. 53 Tahun 2011; Perda Kab. HSS No. 26 Tahun 2007.

- Peraturan Daerah ini Mengatur tentang:
Pengelolaan Sampah, dengan sistematika sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum;
2. Ruang Lingkup;
3. Asas dan Tujuan;
4. Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah;
5. Hak dan Kewajiban;
6. Perizinan;
7. Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah;
8. Insentif dan Disinsentif;
9. Pembiayaan dan Kompensasi;
10. Kerja Sama;
11. Peran Masyarakat;
12. Larangan;
13. Pembinaan dan Pengawasan;
14. Penyidikan;
15. Sanksi Administratif;
16. Penyelesaian Sengketa;
17. Ketentuan Pidana;
18. Ketentuan Peralihan;
19. Ketentuan Penutup.

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 25 Januari 2013.

CATATAN : -